PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA TENTANG PDRD

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Jawa Tengah

Masa Persidangan kedua tahun sidang 2025/2026

Dibacakan oleh :

Hartanto

Semarang, 30 April 2026

Assalamu'alaikum Wr Wb,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Budaya,
Rahayu, dan
Salam Kebajikan.
Merdeka!

Yang kami hormati:

1) **Saudara Ketua DPRD dan Pimpinan Rapat yang Kami Hormati,**
2) **Saudara Gubernur Jawa Tengah yang Kami Hormati,**
3) **Rekan-Rekan Anggota DPRD yang Kami Hormati,**
4) **Seluruh Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah,**
5) **Rekan-Rekan Wartawan, LSM, dan segenap Tamu Undangan yang Berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan hadir sebagai representasi politik yang memiliki tanggung jawab historis dan ideologis untuk berdiri tegak di sisi Wong Cilik.

Pandangan Umum ini merupakan instrumen resmi untuk menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap kebijakan eksekutif Sesuai dengan semangat Banteng Moncong Putih, kami memperjuangkan agar setiap alokasi

APBD merefleksikan prinsip Trisakti, yakni Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Kami menolak kebijakan yang tidak berbasis data kerakyatan dan berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural.

Bung Karno mengajarkan bahwa Berdikari di Bidang Ekonomi bukan sekadar slogan itu adalah syarat kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kemandirian fiskal daerah adalah soko gurunya. Tanpa fiskal yang kuat, tidak ada pembangunan. Tanpa pembangunan, tidak ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, kemerdekaan hanya kata-kata. Itulah mengapa Fraksi PDI Perjuangan tidak memandang Raperda ini sebagai urusan teknis semata. Pajak dan retribusi daerah adalah wajah negara di depan rakyatnya. Dari sanalah rakyat menilai, apakah pemerintahnya hadir untuk melayani, atau sekadar memungut?

Raperda yang ada di hadapan kita hari ini adalah salah satu jawaban atas persoalan itu. Dan kami hadir untuk memastikan bahwa setiap pasal yang nanti disahkan betul-betul berpihak bukan kepada penyelenggara, bukan kepada kepentingan administratif, tetapi kepada rakyat Jawa Tengah yang sesungguhnya. Fraksi PDI Perjuangan memahami bahwa Raperda ini lahir bukan dari keinginan menaikkan tarif semata. Ini adalah konsekuensi hukum yang tidak bisa dihindari dari ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penataan organisasi itu mengakibatkan perubahan nomenklatur, penggabungan perangkat daerah, lahirnya Rumah Sakit Umum Daerah baru, dan penyesuaian kewenangan pelayanan. Akibatnya, Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih menggunakan

nama dan struktur OPD lama menjadi tidak sinkron. Tanpa perubahan ini, pemungutan yang dilakukan bisa kehilangan pijakan hukumnya. Dan itu berbahaya bukan hanya bagi keuangan daerah, tapi bagi hak-hak rakyat sebagai wajib retribusi. Kami juga memahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023 menegaskan: seluruh pengaturan pajak dan retribusi daerah wajib dimuat dalam satu Peraturan Daerah. Maka tidak ada pilihan lain perubahan ini harus dilakukan.

Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya menyampaikan pandangan prosedural, melainkan untuk menyuarakan kepentingan fundamental rakyat Jawa Tengah. Kami memandang Raperda ini bukan sekadar rutinitas legislasi. Bagi kami, setiap butir pasal dalam draf ini adalah janji negara kepada rakyatnya. Sesuai ajaran Bung Karno, kekuasaan harus menjadi alat untuk menyantuni "Wong Cilik". Pelayanan publik yang prima adalah manifestasi nyata dari kehadiran negara di tengah-tengah rakyat.

Pimpinan Sidang yang terhormat dan para hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan telaah kami terhadap Naskah Akademik dan draf Raperda, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pandangan sebagai berikut :

1) **Perubahan Nomenklatur Tidak Boleh Menciptakan Kekosongan Layanan**

Dokumen Penjelasan Raperda mengakui adanya penggabungan perangkat daerah, pembentukan unit organisasi baru, dan penyesuaian kewenangan pelayanan. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan: dalam masa

transisi ini, tidak boleh ada rakyat yang datang ke kantor dinas hanya untuk mendapat jawaban “kami belum tahu kewenangannya ada di mana.

Restrukturisasi OPD adalah urusan internal pemerintah. Rakyat tidak boleh menanggung kebingungan birokrasi. Kepastian hukum harus segera hadir, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan ini wajib dilakukan sebelum Perda berlaku bukan setelahnya.

2) Tarif Retribusi Kesehatan. Ini Soal Nyawa, Bukan Sekadar Angka

Salah satu substansi paling krusial dalam Raperda ini adalah penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan termasuk untuk RSUD baru yang terbentuk akibat restrukturisasi, serta layanan kesehatan mata. Fraksi PDI Perjuangan ingin mendengar jawaban yang jelas dari pihak eksekutif: apakah penyesuaian tarif ini sudah dikaji berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Tengah saat ini? Apakah sudah ada simulasi dampaknya terhadap warga miskin yang tidak terlindungi JKN?

Kami tidak anti perubahan tarif. Kami anti kenaikan tarif yang tidak dibarengi peningkatan kualitas layanan. Jangan sampai rakyat membayar lebih mahal, sementara antrean masih panjang dan petugas masih cemberut. Penyesuaian tarif harus berjalan beriringan dengan standar pelayanan yang naik kelas bukan sekadar angka di lampiran Perda.

3) Digitalisasi Pemungutan, Jangan Sekadar Jargon

Dokumen Penjelasan Raperda sendiri merekomendasikan penguatan sistem administrasi dan digitalisasi pemungutan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik

semangat ini tapi kami ingin lebih dari sekadar rekomendasi. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) harus menjadi kewajiban, bukan pilihan. Setiap transaksi retribusi yang masih berjalan secara tunai dan manual adalah pintu terbuka bagi kebocoran. Setiap rupiah yang tidak tercatat secara digital adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke kas daerah dan itu berarti pembangunan yang tertunda, pelayanan yang terkorbankan. PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan rakyat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan menguap di tengah jalan.

4) Tarif Harus Proporsional, Bukan Memberatkan.

Dokumen Penjelasan Raperda sendiri menegaskan bahwa struktur dan besaran tarif retribusi harus memperhatikan kemampuan masyarakat, prinsip keadilan, dan proporsionalitas. Fraksi PDI Perjuangan memegang prinsip ini sebagai patokan. Kami mendukung optimalisasi PAD, karena PAD yang kuat adalah fondasi kemandirian fiskal, dan kemandirian fiskal adalah syarat hadirnya negara untuk rakyat. Tapi ada garis yang tidak boleh dilangkahi: peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan cara memeras rakyat. Kajian teknis tarif harus terbuka untuk diverifikasi. Benchmarking dengan provinsi lain sebagaimana disarankan dalam dokumen Penjelasan harus benar-benar dilakukan, bukan sekadar formalitas. Kami ingin pembahasan di Pansus nanti menghadirkan data perbandingan itu secara transparan.

Pimpinan Sidang yang terhormat dan para hadirin yang kami hormati,

Di antara semua catatan kami, ada satu hal yang Fraksi PDI Perjuangan tempatkan sebagai garis merah: jangan sampai ada warga Jawa Tengah yang kehilangan haknya atas layanan kesehatan karena tidak mampu membayar tarif yang baru. Perda ini harus secara eksplisit menjamin bahwa kelompok miskin, penerima bantuan sosial, dan mereka yang tidak terlindungi sistem jaminan nasional tetap mendapatkan pelayanan yang bermartabat. Bukan pelayanan kelas dua. Pelayanan yang sama, dengan martabat yang sama. Karena itulah negara ada. Karena itulah pajak dan retribusi dipungut. Bukan untuk memperkaya birokrasi, tapi untuk memastikan tidak ada seorang pun yang sakit lalu pulang karena tidak punya uang.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini ke tingkat selanjutnya dengan catatan seluruh poin kritis di atas wajib menjadi agenda utama dalam pembahasan komisi maupun Pansus. Kami akan mengawal setiap pasal. Kami akan memastikan bahwa Perda PDRD ini benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bukan sekadar dokumen administratif yang mengikuti arus restrukturisasi birokrasi. Mari kita jadikan Perda ini jembatan menuju Jawa Tengah yang lebih sejahtera, lebih berdikari, dan lebih adil bagi seluruh rakyatnya.

Fraksi PDI Perjuangan akan terus menjadi pionir dalam mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh penyelenggaraan kebijakan publik. Kami berharap Pemerintah Provinsi menjadikan Pandangan Umum ini sebagai instrumentasi politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Sebelum mengakhiri Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan, kami kutipkan kata mutiara sebagai pantikan semangat

dari Bung Karno: ***"Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat".***

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kali ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan Semoga tuhan YME memberikan bimbingan kepada kita semua dalam menyusun regulasi yang maslahat bagi rakyat Jawa Tengah.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua, Merdeka!